

Transformasi Spasial di Kota Ternate

by Nengyanti Nengyanti

Submission date: 13-Jun-2023 01:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115073909

File name: 11._Transformasi_Spasial_di_Kota_Ternate.pdf (386.41K)

Word count: 5224

Character count: 34070

Transformasi Spasial di Kota Ternate

Novita Yanti¹✉, Yoyok Hendarso², Nengyanti³
^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor terjadinya transformasi spasial di Kota Ternate dan menganalisis dampak yang ditimbulkan setelah adanya transformasi spasial di Kota Ternate. Teori yang digunakan adalah produksi ruang (*the production of space*) dengan fokus penelitian pada analisis faktor terjadinya transformasi spasial dan dampak yang ditimbulkan setelah adanya transformasi spasial di Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan transformasi spasial merupakan produk kebijakan yang membutuhkan perencanaan matang terkait perubahan pemanfaatan ruang, hal ini penting karena berhubungan dengan aspek-aspek seperti sosiokultural, ekonomi dan politik.

Kata kunci: Transformasi; Spasial; Kota Ternate.

Copyright (c) 2022 Novita Yanti

✉ Corresponding author :
Email Address : novitay123@gmail.com

PENDAHULUAN

Penataan ruang khususnya kota di Indonesia masih dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dan cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, ataupun untuk memenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tidak bisa dihindari (Firtiana, 2014). Orientasi penataan Kota yang demikian itu kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Semestinya secara konseptual rencana tata ruang itu dikonsepsikan sebagai suatu rencana yang disusun secara menyeluruh terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan dan pembangunan kota (Hendarso & Mirani, 2020). Suatu rangkaian yang bersifat terpadu berupa uraian kebijaksanaan dan langkah yang bersifat mendasar dilengkapi dengan data serta peta penggunaan ruang. Perluasan fungsi Kota mengakibatkan perkembangan karakteristik perkotaan meluas ke wilayah sekitarnya dan menimbulkan integrasi keruangan antarwilayah (Maddatuang, 2021). Batas fisik Kota selalu mengalami perubahan sehingga batas fisik kota tidak selalu berada di dalam batas administrasi kota. Munculnya bangunan baru yang berkembang pesat merupakan proses perkembangan fisik wilayah ke arah "mengkota" yang terjadi pada wilayah yang secara administrasi dekat dengan Kota, sehingga terjadi kecenderungan

pergeseran fungsi (Nong & Du, 2011). Kekotaan ke wilayah pinggiran Kota. Hal ini disebut proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar. Akibat selanjutnya, wilayah pinggiran Kota mengalami proses transformasi spasial.

Fenomena perluasan kawasan perkotaan ditandai berkembangnya lokasi pemukiman di pinggiran Kota maka pada daerah pemukiman tersebut berkembang pula fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan keuangan (Asmara dkk, 2020). Semakin besar suatu Kota semakin beragam fasilitas dan jangkauan pelayanannya sehingga semakin luas wilayah pengaruhnya (Karim, 2020). Dalam perencanaan wilayah, sangat perlu ditetapkan suatu tempat pemukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai Kota. Hal ini karena Kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibandingkan dengan daerah perdesaan (Persada, 2015).

Kebijakan pembangunan dan pengembangan Kota merupakan langkah perbaikan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan aspek fisik, ekonomi dan sosial budaya, untuk merealisasikan program kerja yang menjadi tujuan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan perancangan Kota yang matang dengan skala prioritas, mengingat tingkat kebutuhan pelayanan dan perubahan struktur ruang kota pada setiap daerah berbeda, baik tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi maupun kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki (Mahendra & Pradoto, 2016).

Kota Ternate merupakan Kota pulau yang terletak di Provinsi Maluku Utara Indonesia. Kota ini dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 dengan status menjadi Kota Madya yang terdiri dari 3 kecamatan dan 77 Kelurahan. Pada tahun 2001 wilayah ini dimekarkan menjadi 4 kecamatan. Selanjutnya, di tahun 2009, wilayah ini dimekarkan lagi menjadi 7 kecamatan. Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 tahun 2016, ada tambahan 1 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Ternate Barat yang dimekarkan dari Kecamatan Pulau Ternate.

Kota Ternate adalah kota pulau yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah 5.709,72 Km² terbagi atas lautan seluas 5.547,55 Km² atau 71,6 % dan daratan seluas 162,17 KM² atau 28,4% (Badan Pusat Statistik Kota Ternate, 2021) (Bapperda, 2021). Merujuk data tersebut terlihat dengan jelas bahwa luas wilayah Kota Ternate didominasi perairan, dengan kata lain luas wilayah daratan sangat kecil. Selain luas daratan yang kecil, topografi Kota Ternate terdapat sebuah Gunung Gamalama, gunung api aktif dengan kemiringan lereng terbesar 40% yang mengerucut keatas Pulau yang diselimuti gunung berapi di tengah kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 205.001 jiwa yang terdiri atas 103.119 jiwa penduduk laki-laki dan 101.882 jiwa penduduk perempuan (BPS Kota Ternate, 2020).

Kondisi empiris Kota Ternate dipandang tidakrepresentatif baik luas wilayah daratan, topografi (Gunung berapi aktif dalam Kota) dan padatnya jumlah penduduk hal ini menjadi masalah urgen yang mendorong Pemerintah Kota terus berupaya melakukan pengembangan kawasan demi menjawab kebutuhan spasial bagi penduduk kota. Pengembangan kawasan dimaksud difokuskan pada kawasan pesisir Timur dan pesisir Selatan sebagai kawasan pertumbuhan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sarana ibadah, transportasi dan ruang terbuka hijau (Taman Kota berbasis budaya). Sebaran dan ketersediaan infrastruktur di kawasan tersebut menjadi

indikator fungsi pusat pelayanan dalam skala Kota ikut bergeser atau berubah (Destiyana dkk, 2019). Dengan demikian, wilayah pesisir menjadi alternatif strategis dalam pengembangan kawasan perkotaan dengan metode reklamasi pantai. Hal ini diatur dalam *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)* Kota Ternate tahun 2012-2032.

Melalui interpretasi pencitraan beresolusi tinggi, transformasi spasial fisik perkembangan kawasan terbangun di sepanjang Koridor Perkotaan Kota Ternate pada tahun yang berbeda. Tumbuhnya area terbangun di sepanjang Koridor Perkotaan Kota Ternate sebagai upaya memenuhi permintaan berbagai fasilitas penunjang aktivitas sosial ekonomi sebagai akibat perluasan investasi dari pusat pertumbuhan ke daerah pinggiran. Bentuk dari kawasan terbangun dapat dijadikan penilaian tingkat kekotaan di Wilayah Kota Ternate. Jika sebagian besar permukaannya tertutup bangunan dengan karakter yang sangat kompleks maka wilayah tersebut sudah menunjukkan karakteristik Kota, sedangkan wilayah yang masih berkarakter perdesaan sebagian besar wilayahnya masih berupa ruang terbuka hijau seperti lahan pertanian dan perkebunan.

Proses pembangunan yang terjadi dari tahun 2010 hingga ke 2020 telah mengubah sebagian penggunaan lahan perkebunan di wilayah pegunungan sampai reklamasi di wilayah pesisir perkotaan menjadi lahan terbangun. Selain itu, proses kebijakan dari Wali Kota pertama hingga kini, terus berkembang dengan pola yang sama, selalu mengabaikan hak manusia dan alam (*nature right*) dan hanya menekankan pada kepentingan ekonomi yang terpusat dan tidak tersebar secara adil dan merata (Hasanah, 2017). Fakta menunjukkan bahwa perubahan tutupan hutan pada wilayah pegunungan di Kota Ternate terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hutan produksi yang dikonversi/dialihfungsikan sebesar 4403,83 ha dan pada tahun 2021 sebesar 4501,76 serta meningkat pada tahun 2022 sebesar 5242,60 ha. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun perubahan penutupan hutan atau alih fungsi hutan pada wilayah Kota Ternate terus meningkat. Perubahan ini disebabkan tuntutan pemanfaatan ruang untuk pemukiman penduduk. Kondisi ini tidak dapat dielakkan karena laju jumlah penduduk di Kota ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Hidayat dkk, 2015). Sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang, pemerintah mendorong kebijakan reklamasi guna pemanfaatannya peruntukkan ruang bagi program pembangunan di daerah.

METHODOLOGI

Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih dan dipakai oleh Peneliti untuk menyatukan secara komprehensif komponen penelitian (*Research*), berdasarkan ulasan di atas maka, Peneliti menetapkan metode atau strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Daniel, 2014). Desain Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut maka desain penelitian dapat dilakukan berdasarkan ciri-ciri keilmuan yaitu rasional artinya kegiatan penelitian wajib dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal yang dapat dijangkau oleh penalaran manusia; Empiris artinya cara-cara yang dapat dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan; dan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2017).

Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau menyeluruh, kompleks, dinamis dan penuh makna atau sering dikenal dengan paradigma postpositivisme (Agusta, 2014). Penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data parsial kedalam tema dan selanjutnya memberikan interpretasi makna suatu data, kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2017). Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2019).

1. Teknik pengumpulan data

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel dalam penelitian ini, maka peneliti memakai teknik pengumpulan data yakni; (1) Wawancara mendalam adalah dialog dua arah dalam suasana status yang sama, akrab dan tidak formal (Karim dkk, 2021). Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dan informasi secara mendalam dan komprehensif melalui tanya-jawab secara langsung kepada *informant*. Wawancara dilakukan dengan informasi kunci terkait transformasi spasial dan pola kebijakan pembangunan di Kota Ternate. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, saran dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu bertatap muka langsung dengan informan dan wawancara melalui telepon dalam suasana yang informal sehingga informasi dapat diperoleh dengan lancar. (2) Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. Peneliti melakukan penglihatan, mendengar dan merasakan secara langsung hal/keadaan yang diteliti transformasi spasial dan pola kebijakan pembangunan di Kota Ternate. Kemudian peneliti melakukan pencatatan, perekaman dan mendokumentasikan dalam bentuk foto. (3) Studi dokumentasi adalah merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan melakukan analisis dokumen-dokumen yang ada, baik dokumen yang tertulis, berupa gambar, hasil karya, maupun dokumen elektronik (Nilamsari, 2014). Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud berupa dokumen yang tertulis yaitu dokumen RPJMD dan dokumen Perencanaan Tata Ruang (RTRW), serta Perda pembangunan dan data lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan gambar berupa foto-foto wawancara yang dilakukan.

2. Teknik pengabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Menentukan keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2017). Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yakni; triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Teknik analisis data, Sugiyono 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Transformasi Spasial Kota Ternate tidak terlepas dari sejarah masa lalu yaitu Kerajaan Moloku Kie Raha. Kota Ternate juga merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Hal ini terbukti dalam catatan sejarah di mana nama Ternate tertulis dalam Kitab Negarakertagama Karangan Mpu Tantular. Komunitas masyarakat di Ternate sendiri sebenarnya muncul sejak tahun 1250, saat terjadi eksodus besar-besaran rakyat Halmahera ke berbagai pulau di bagian barat Halmahera, termasuk ke pulau Ternate yang disebabkan pertikaian politik. Kota Ternate merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku Utara, dengan sebutan *waterfront city* di Indonesia yang mana awalnya dikenal dalam sejarah dunia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah skala internasional (pada abad ke-15). Selama menjadi Kota Madya, Ternate telah menunjukkan perkembangan sebagai kotaperdagangan dan industri serta kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Faktor Transformasi Spasial Kota Ternate

Faktor yang mempengaruhi transformasi spasial kota Ternate, dipicu tingginya para penduduk (migrasi) yang berasal dari daerah lain datang ke peningkatan jumlah penduduk di Ternate bukan karena tingginya angka kelahiran, namun dipicu oleh tingginya para penduduk yang berasal dari daerah lain datang ke Ternate. Penduduk dari daerah lain yang datang ke Ternate sebagian besar berasal dari luar Maluku dan daerah lainnya, seperti pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di Kota Ternate. Begitu pula, membanjirnya para pedagang dari luar Maluku yang datang ke Ternate semakin tinggi, kendati bukan warga Ternate sehingga mempengaruhi jumlah penduduk di Kota Ternate. Kota Ternate merupakan salah satu tujuan individu terinspirasi pada aspek sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Banyak terjadi di berbagai daerah di provinsi Maluku Utara salah satunya adalah Kota Ternate. Kota Ternate daerah yang destinasi para migrasi karena keberadaannya yang strategis dan mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para migran. Hal ini sama seperti daerah-daerah lain di kawasan Indonesia yang migran datang mencari peluang di bidang pendidikan dan ekonomi dalam meningkatkan kehidupannya

(Fahmi dkk, 2016). Terdapat duamacam proses migrasi, yaitu migrasi yang berjalan lambat dan berlangsung dengan sendirinya dan migrasi yang berlangsung secara cepat dan mendadak. Proses migrasi yang berjalan lambat adalah proses migrasi yang didasarkan pada proses perkembangan manusia itu sendiri. Seperti kebutuhan untuk mencari daerah yang lebih aman, subur, dan lebih mudah untuk mencari makanan untuk mempertahankan hidup. Proses migrasi yang berlangsung secara cepat dan mendadak sering terjadi pada masyarakat modern, seperti keharusan untuk mencari tempat tinggal baru karena tempat tinggal yang lama telah hancur terkena bencana alam, kelaparan, perang, penyakit menular, dan sebagainya

Migrasi yang terjadi di Ternate kebanyakan adalah migrasi internal (Migrasi Nasional). Migrasi internal (Migrasi Nasional) salah satunya adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah kota ternate perpindahan penduduk daridadaerah pedesaan ke daerah perkotaan faktor penyebab terjadinya migrasi ke Ternate merupakan daya tarik Kota Ternate yaitu upah tenaga kerja yang lebih tinggi dari daerah asal, jumlah pekerjaan yang banyak, dan fasilitas kehidupan yang memadai. Selain itu, faktor pendorong paramigran pindah ke Ternate yaitu lahan pekerjaan semakin sempit, rendahnya upah, kurangnya fasilitas kehidupan di daerah asal, kegiatan pertanian hanya musiman, dan adanya keinginan para migran untuk memperbaiki kehidupan.

2. Urbanisasi Penduduk Kota Ternate

Kota Ternate seiring dengan kemajuan zaman membuat pola pikir dari masyarakat mengalami banyak perubahan. Terlalu dengan kemajuan yang sangat pesat pada kota-kota besar mengakibatkan banyak yang memilih untuk mengadu nasib dan mencoba peruntungannya untuk hidup pada kota besar tersebut. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi yang meliputi faktor penarik dan pendorong. Faktor penarik merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena terdapat daya tarik yang ditawarkan. Faktor pendorong terdiri atas fasilitas kesehatan yang memadai, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan kerja, keamanan kehidupan dan property yang lebih baik dan lingkungan sosial yang lebih baik. Sedangkan faktor pendorong merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pindah ke kawasan perkotaan karena kondisi pedesaan yang sudah tidak mendukung (Maddatuang dkk, 2020). Faktor pendorong meliputi kemiskinan, standar hidup yang rendah, keamanan hidup yang rendah, minim fasilitas transportasi dan komunikasi, kurangnya lapangan pekerjaan, minim fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan yang rendah.

Transformasi wilayah dapat dimaknai sebagai perubahan yang terjadi pada suatu wilayah dalam proses kurun waktu tertentu dari berbagai aspek. Transformasi yang terjadi pada suatu wilayah yang paling dapat terlihat adalah transformasi secara fisik atau spasial. Kota Ternate memprediksi kebutuhan lahan pemukiman di Kota Ternate pada tahun 2025, 2030 dan 2035. Akan terjadi prediksi kebutuhan lahan pemukiman di masa yang akan datang untuk perencanaan kota, hal inilah yang akan menyebabkan faktor akan terjadinya Transformasi spasial di Kota Ternate. Ketersediaan lahan pemukiman merupakan salah satu masalah penting dalam kependudukan dan perencanaan kota. Kota Ternate merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi tinggi di Provinsi Maluku Utara. Dengan peningkatan jumlah penduduk seiring dengan waktu, maka akan membutuhkan area pemukiman yang semakin luas. Data kepadatan penduduk didapatkan dari jumlah penduduk dan luas

kelurahan. Semakin tinggi jumlah penduduknya pada daerah yang sempit maka akan memiliki kepadatan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang luas. Adanya peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dengan jumlah ketersediaan lahan yang terbatas, maka mempengaruhi struktur kepadatan penduduk (demografi) yang terus meningkat.

3. *Pertumbuhan Ekonom*

1. *Pergerakan orang, barang dan jasa di Kota Ternate tentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan tertentu. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan, itulah mengapa interaksi antar ruang dapat memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Daerah perkotaan Kota Ternate merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah, karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Melalui perkotaan pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara berkala dan menyebar keseluruh bagian-bagian. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kota dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, untuk sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan. pada triwulan I dan II 2021 mencatatkan nilai yang positif sebesar 8,2%, sedangkan untuk sektor penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang memiliki andil sebesar 29,69 %.*

2. *Produk ruang merupakan implementasi dari kebijakan transformasi spasial, dimana fakta menunjukkan bahwa fenomena penataan ruang perkotaan Kota Ternate saat ini sangat dipengaruhi oleh interest pemilik modal sehingga warga kota ternate kehilangan hak atas kotanya. Data terkait produksi ruang Kota Ternate dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini:*

Tabel 1. Produksi Ruang Kota Ternate Tahun 2019

Produksi Ruang	Luas Produksi Ruang Tahun 2019
Kawasan Produksi ruang	80,2 Ha
Kawasan Tidak Produksi ruang	7,64 Ha

Sumber: RTRW Kota Ternate 2012-2023

Selanjutnya produksi ruang Kota Ternate tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Produksi Ruang Kota Ternate Tahun 2020

Produksi Ruang	Luas Produksi Ruang Tahun 2020
Kawasan Produksi ruang	82,2 Ha
Kawasan Tidak Produksi ruang	6,12 Ha

Sumber: RTRW Kota Ternate 2012-2023

Selanjutnya produksi ruang Kota Ternate tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Kawasan Produksi Ruang Tahun 2021

Produksi Ruang	Luas Produksi Ruang Tahun 2021
Kawasan Produksi ruang	83,2 Ha

Kawasan tidak produksi ruang 4,15 Ha

Sumber: RTRW Kota Ternate 2012-2023

Perubahan pemanfaatan kawasan produksi ruang Kota Ternate dari tahun 2019-2021 mengalami perubahan signifikan, hal ini dikarenakan adanya pengembangan reklamasi (transformasi spasial) sehingga dari tahun 2019-2021 terhitung luas dari kawasan produksi ruang terbangun pada pusat Kota Ternate adalah sebesar 83,2 Ha. Sebaliknya kawasan tidak terbangun yang terdapat pada tabel di atas menyatakan bahwa dari tahun 2019 -2021 tetap sama dengan luas sebesar 4,15 Ha.

Pemahaman

Transformasi wilayah dapat dimaknai sebagai perubahan yang terjadi pada suatu wilayah dalam proses kurun waktu tertentu dari berbagai aspek pada batasan teritorial tertentu. Transformasi spasial pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Transformasi spasial yang terjadi pada suatu ruang akan membentuk pola tertentu yang membedakannya tergantung faktor yang mempengaruhinya (Rosilia dkk, 2021). Sama halnya dengan kebijakan mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Ternate yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan pembangunan sesuai dengan fungsi dan peruntukan setiap wilayah tertentu. Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh multifaktorial, sehingga dapat dikatakan sebagai proses yang bersifat kompleks (Hendarso dkk, 2019). Model implementasi kebijakan yang melahirkan transformasi spasial oleh karena itu penelitian ini mengarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi spasial dan dampak dari transformasi spasial.

1. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori transformasi spasial di tinjau dari aspek tata ruang

Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Berdasarkan (PERDA Nomor 2 Tahun 2012) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 meliputi:

- 1) Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa;
- 2) Pusat kegiatan sektor pariwisata;
- 3) Pusat kegiatan sektor perikanan dan pengembangan Minapolitan;
- 4) Pusat kegiatan sektor perumahan;
- 5) Pusat kegiatan Pertanian;
- 6) Pusat kegiatan sektor industri kecil dan ringan;
- 7) Pusat kegiatan sektor perkantoran; dan
- 8) Pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum.

Pada Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Pasal 30 ayat 2 dimana reklamasi kawasan terjadi di beberapa titik untuk sektor jasa dan perdagangan, yakni di area pantai mulai dari Kelurahan Kalumata, Bastiong, Toboko, Mangga Dua (Kecamatan Ternate Selatan), Kelurahan Kotabaru, Muhajirin, Gamalama, Makassar Timur (Kecamatan Ternate Tengah), dan Kelurahan Salero, Dufa-dufa (Kecamatan Ternate Utara) Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional Sikap penerimaan atau penolakan wilayah tata ruang kota ternate dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Transformasi spasial . karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi di lingkungan setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan wilayah tata ruang biasanya bersifat *topdown* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Rusydan, 2016). Dalam penelitian ini, Perda RTRW ditinjau dari aspek Tata ruang yang memiliki payung hukum yang mengikat.

2. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori transformasi spasial di tinjau dari aspek konsep zoning

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pasal 20 ayat 1 huruf f dikekaskan Zonasi merupakan turunan dari suatu rencana atau disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang, tujuan penyusunan peraturan zonasi antara lain:

- 1) Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindakan atas suatu satuan ruang;
- 2) Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup;
- 4) Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 5) Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek zoning pada wilayah perkotaan Kota Ternate yang sangat berperan adalah dinas PUPR, Dinas PERKIM, Dinas BLH, Dinas BAPPEDA dan Dinas PTSP yang saling bersinerji pada implementasikan kebijakannya. Jika kita lihat kebijakan implementasi transformasi spasial pemerintah kota ternate dengan konsep zoning lebih banyak melahirkan konflik horozontal dimana ruang-ruang publik dialifungsikan, lahan pertanian dialifungsikan, wilayah ekosistem hayati dialifungsikan, hutan magrof dialifungsikan dan penggusuran pemukiman penduduk (Syamsuddin dkk. 2022). Pemerintah Kota Ternate untuk mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah belum optimal. Zonasi dikawasan konservasi merupakan pembagian lokasi yang mengacu pada apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan di area / zona yang pemanfaatan berbeda dari kawasan konservasi dalam hal pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan buatan. Zonasi membantu mengurangi atau menghilangkan konflik antara pengguna.

3. Pembahasan hasil penelitian disandingkan dengan teori transformasi spasial di tinjau dari aspek pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000) tiga tujuan inti pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Siregar dkk, 2021). Pembangunan dengan pendekatan transformasi spasial tentunya memiliki dampak ekonomi yang besar. Suatu daerah, tentunya pembangunan yang mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat. Hubungan dengan transformasi spasial tentunya memiliki dampak negatif maupun positif, akibat dari pembangunan masyarakat menjadi korban sebagai objek dari impelentasi perkembangan kota. Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa/ atau daerah. Artinya bahwa pembangun Kota Ternate wajib untuk dibangun sebaagai kebutuhan dan kehendak masyarakat bersama pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pembangunan Kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan dengan wilayah kota yang di kelilingi oleh laut sehingga arah kebijakan pembangunan Kota Ternate dengan pemetaan pengembangan kota di daerah pesisir pantai maka lahirnya konsep pembangunan kota ternate dimulai dari reklamasi pantai. Kebijakan reklamasi sebagai solusi untuk pengembangan kota suda tentu mendapat kendala yang di hadapi seperti penimbunan area lahan pantai yang mengakibatkan ekosistem laut tercemar, terjadi erosi dan banjir dan pada bulan Maret tahun 2022 daerah yang masuk zona reklmasi seperti Bantiong, Mangga Dua, Fala Jawa Dua dan Dufa-Dufa mengalami air pasang (rob) sehingga uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kota Ternate dilihat dari teori produksi ruang maupun transformasi spasial belum sepenuhnya efektif dilakukan dikarenakan aspek tata ruang, aspek produksi ruang, aspek konsep zoning belum tersinkronisasi dengan perda RTRW dan keterlibatan unsur pemagku kepentingan baik dari masyarakat, Pemerintah Kota Ternate, Pengamat Kota, LSM dan akademisi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian Transformasi Spasial di Kota Ternate, menyimpulkan temuan-temuan, transformasi spasial Kota Ternate, di mana pembangunan reklamasi pantai menjadi program prioritas untuk dikembangkan, sebagai solusi menjawab kebutuhan ruang lahan yang semakin sempit, hal ini bertujuan untuk menjawab semangat reklamasi yang telah tercantum pada PERDA nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Kota Ternate. Transformasi spasial Kota Ternate bukan hanya menjadi keinginan, tapi sudah menjadi kebutuhan, hal ini merupakan dampak dari sebuah perubahan. Perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi di Kota Ternate, dipengaruhi oleh pergerakan yang disebabkan oleh interaksi

antar ruang dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan dan informasi serta Migrasi. Adapun penyebab transformasi dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional dan distribusi barang.

Transformasi spasial Kota Ternate yang diimplementasikan pada kegiatan reklamasi pantai banyak mendapat tantangan dari masyarakat, diantaranya mahasiswa bersama masyarakat yang secara tegas menolak adanya reklamasi pantai, alasan utama hilangnya pengalihan lahan dari lahan pertanian ke lahan pemukiman, hilangnya ekosistem lingkungan semakin sempit ruang hijau, terjadi erosi, abrasi dan paling dirasakan oleh masyarakat Kota Ternate adalah terjadi banjir pada musim hujan. Transformasi spasial Kota Ternate dari aspek kebijakan dan regulasi khususnya pada kawasan area reklamasi mampu meredam konflik horizontal antara Pemerintah, dan masyarakat, aspek kebijakan yang dimaksud adalah akibat dari lajunya transformasi spasial di Kota Ternate yang mengakibatkan hilangnya lahan masyarakat, dampak kepentingan para pemegang modal, alih fungsi lahan, hilangnya hutan mangrove ini semua terjawab pada hasil wawancara para aktor dan pelaku kebijakan transformasi spasial yang terjadi di Kota Ternate, pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Kawasan Hutan Mangrove di Kelurahan Mangga dua dan Bastiong ditetapkan sebagai hutan lindung (Daerah Simpadan Pantai) yang tidak bisa dialihfungsikan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Referensi :

- Agusta, Ivanovich. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 02(1998), 1-11.
- Asmara, W. H., Sarno, S., & Nengyanti, N. (2020). Gender Based Waste Management Model in Sei Sembilang, Banyuasin Regency, South Sumatera Province. *Jurnal Sylva Lestari*, 8(3), 308-325.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kota Ternate Dalam Angka 2020*. Ternate, Indonesia.
- Bappeda. (2021). *Teori Dan Indikator Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Ternate, Indonesia.
- Daniel L. Stufflebeam, C. L. C. (2014). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. Jossey-Bass.
- Destisya, J., Hendarso, Y., & Yusnaini, Y. (2019). Peran Peer Group dalam Membentuk Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 126-139.
- Fahmi, F., Sitorus, S., & Fauzi, A. (2016). Lahan Berbasis Rencana Pola Ruang Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tata Loka*, 18(1), 27-39.
- Fitriana, E. (2014). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 217-223.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

- Hendarso, Y., & Mirani, D. (2020). The Network Strategy of Integrated Service Centers for Women and Children Empowerment Actors in Strengthening Institutions in the Socio-Cultural Environment of Palembang City, South Sumatera. *KnE Social Sciences*, 389-397.
- Hendarso, Y., Suleman, Z., Supriyanto, S., & Ali, M. (2019, March). Effect of the Moderation of Economic Institution on Local Economic Development. In *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)* (pp. 345-349). Atlantis Press.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(2), 130-146. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.2.5>
- Hu, Z., & Lo, C. P. (2007). Modeling urban growth in Atlanta using logistic regression. *Computers, Environment and Urban Systems*, 31(6), 667-688. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2006.11.001>
- Karim, A. (2020). The role of BUMDes as supporting regional economy in Enrekang Regency based on local wisdom. [HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU](https://www.academia.edu/43785786), 43785786.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95.
- Maddatuang, B., Sabara, Z., Wekke, I. S., & Karim, A. (2020). *Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin*. Penerbit Qiara Media.
- Maddatuang, B., Syukur, A., Indar, S. H., & Karim, A. (2021). The rural economic growth in south Sulawesi drives the national Sustainable Development Goals. *International Journal of Management (IJM)*, 12(3), 2021.
- Mahendra, Y. I., & Pradoto, W. (2016). Transformasi Spasial di Kawasan Peri Urban Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(1), 112. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11462>.
- Moleong, L. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, iii-410.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177-181.
- Nong, Y., & Du, Q. (2011). Urban growth pattern modeling using logistic regression. *Geo-Spatial Information Science*, 14(1), 62-67. <https://doi.org/10.1007/s11806-011-0427-x>
- Persada, C. (2015). MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN (Studi Kasus: Kota Bandarlampung). *Institut Pertanian Bogor*, 1-55.
- Rosilia, L., Alfitri, A., & Nengyanti, N. (2021). Analisis Peran Gender Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Penenun Kain Songket (Studi Kasus Di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 88-97.
- RTRW Kota Ternate, W. T. (2012). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate. *PERDA Kota Ternate*, 77.
- Rusydan. (2016). *Dualisme Spasial Berbasis Budaya Pasca Konflik Ramadhan Berdarah di Kota Ternate* M Rusydan Hi, Arby, Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D; Ir. Didik Kristadi, MLA., M.Arch.UID.

- Siregar, T. P., Yunindyawati, Y., & Nengyanti, N. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KELOMPOK KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG KB MAKMUR DESA ARISAN GADING, KABUPATEN OGAN ILIR. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 173-180.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.

Transformasi Spasial di Kota Ternate

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.unnes.ac.id

Internet Source

7%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On